

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan sistem politik yang dilakukan Soeharto lebih dikenal dengan sistem Orde Baru telah menebarkan kabut hitam selama hampir 32 tahun. Sistem politik yang dibangun oleh Orde Baru yaitu sistem diktator otoriter<sup>1</sup>. Pembangunan sistem ini telah membuat berdarah-darah dan memakan jutaan korban manusia tahun 1965 yang juga dibarengi dengan penangkapan dan penahanan tanpa melalui proses hukum yang jelas misalnya, kasus Tanjung Priok, Lampung, Petrus (penembakan misterius), Semanggi I & II, penculikan aktivis dan lain sebagainya. Deretan kasus yang panjang di era Orde Baru masih dibarengi dengan kasus korupsi yang sampai saat ini telah menjadi budaya di setiap lapisan masyarakat.

Rentetan kasus yang terjadi pada masa Orde Baru membuat warga semakin tidak percaya akan kepemimpinan Soeharto. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai aksi demonstrasi<sup>2</sup> besar-besaran terjadi diberbagai daerah di Indonesia yang menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Kenyataan tersebut dipicu oleh rasa kecewa rakyat Indonesia atas krisis ekonomi yang semakin mencapai titik puncaknya. Krisis ekonomi ini sendiri imbas politik dan strategi pembangunan yang sentalistik diterapkan Soeharto. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dibiarkan menjamur dimana-mana. Keadilan menjadi

---

<sup>1</sup> Diktator otoriter adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dengan kekuasaan yang absolute atau mutlak

<sup>2</sup> Demonstrasi adalah unjuk rasa, tindakan bersama-sama untuk menyatakan protes.

barang yang sangat langka dan unik di negeri sendiri. Dilain pihak koalisi rakyat yang terdiri dari unsur mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat tertindas lainnya, semakin sadar akan hak-hak politik yang dimilikinya. Gelombang aksi unjuk rasa pun terjadi di sudut-sudut kota dan pedesaan, menyuarakan agenda tunggal menurunkan Presiden Soeharto.

Babak sejarah perjalanan bangsa Indonesia pun dimulai. Semenjak runtuhnya rezim Orde Baru bangsa Indonesia adalah Bangsa yang baru lahir dari dimensi kegelapan menuju pencerahan yang menjanjikan, karena dari sinilah awal atau batu pijakan untuk mengubah bangsa ini ke arah perbaikan, perbaikan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia termasuk di dalamnya aspek-aspek tata pemerintahan atau sistim pemerintahan yang lebih demokratis.

Nafas demokrasi dalam reformasi terdengar di mana-mana. Pasca Soeharto lengser, BJ. Habibie yang ketika itu menjadi Wakil Presiden menduduki kursi Presiden dalam era yang biasa disebut era transisi. Salah satu yang dibebankan kepada Hibibie adalah percepatan pelaksanaan pemilu yang akhirnya disepakati diselenggarakan pada tahun 1999. Peristiwa yang pernah terjadi pada pemilu 1955 kembali terulang, setidaknya dengan banyak partai yang megikuti pemilu.

Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad 20 adalah tuntutan demokratisasi<sup>3</sup>, khususnya dinegara-negara yang sedang berkembang termasuk negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Demokrasi telah menjadi wacana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi

---

<sup>3</sup> Demokratisasi adalah pergerakan untuk merombak bentuk sistim pemerintahan yang dominatif, otoritarian, sentralistik, kearah sistim pemerintahan yang demokratis.

tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.

Demokrasi sendiri terdiri dari bermacam-macam istilah. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa. Menurut Giddens, demokrasi berarti mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan raja atau kaum bangsawan.<sup>4</sup> Sebagaimana dikatakan Nurcholis Majid bahwa demokrasi di Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagad (*universal*) sesuai dengan kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.<sup>5</sup> Oleh karena itu kita bangsa Indonesia, cepat atau lambat, tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan demokrasi yang lebih maju (*advanced*) sebagai agenda lanjutan dari pembangunan nasional. Sebab demokrasi dan demokratisasi yang lebih maju itulah yang akan menjadi jaminan lestari aset nasional dalam jangka panjang.

Transisi dari pemerintah non demokratis menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Permulaan proses demokratisasi biasanya diawali dengan terjadinya krisis, baik itu ekonomi, politik dan merambah pada krisis multidimensi dan berakhir pada

---

<sup>4</sup> Abdul Gofur. M.Ag., *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002, hal 3

<sup>5</sup> Nurcholis Majid, *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia: Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksananya Sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional* dalam Abdul Gofur. M.Ag, *ibid*, hal 3

perpecahan dalam tubuh rezim non-demokratis. Proses menuju demokrasi yang solid akan memakan waktu lebih lama, seringkali puluhan tahun bahkan ratusan Tahun seperti halnya yang terjadi di Inggris Raya.<sup>6</sup>

Kesan yang lebih nyata dari tahapan dan masalah yang ada dalam transisi demokrasi dapat diperoleh dengan menggunakan model sederhana yang menggambarkan beberapa elemen dalam proses demokratisasi. Model tersebut mempunyai satu kondisi latar belakang persatuan nasional yang harus dipahami dahulu sebelum memahami transisi menuju demokrasi. Tahapan transisi demokrasi dengan latar belakang persatuan nasional dibagi menjadi tiga, diantaranya: Tahap pertama adalah tahap persiapan (*preparatory phase*), tahapan ini berisi perjuangan politik dimana rakyat, kelompok masyarakat, menentang pemerintah yang mengakibatkan perpecahan rezim yang tidak demokratis. Tahap kedua adalah tahapan keputusan, yang berisi sebuah keputusan yang dirundingkan oleh sebagian para pemimpin politik untuk melambangkan beberapa aspek krusial dari prosedur demokrasi. Tahapan ketiga adalah tahapan konsolidasi adalah konsolidasi tidak akan tercapai apabila lembaga demokrasi terbentuk dan demokrasi yang baru membuktikan dirinya mampu mengalihkan kekuasaan pada partai oposisi, demokrasi tersebut harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang paling berat dalam proses transisi demokrasi.

Transisi nilai-nilai demokrasi disuatu negara perlu adanya suatu lembaga atau institusi-institusi yang memainkan. Partai Politik merupakan salah satu intitusi inti dari pelaksanaan demokrasi. Mengingat akan pentingnya fungsi partai bahkan

---

<sup>6</sup> Georg Soresen, *DEMOKRASI dan DEMOKRATISASI (Proses dan Prospek dalam Sebuah Negara Berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 71

keberadaan kinerjanya merupakan salah satu ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang disuatu negara. Di negara-negara maju, ukuran keberhasilan demokrasi secara tepat dapat dilihat dari bagaimana paratai politik menjalankan peran dan fungsinya untuk memasukan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat tidak saja bagi kostituen pemilihnya, melainkan bagi seluruh komponen bangsa yang ada. Dengan demikian, keberadaan dan kinerja partai politik juga bisa kita sebut sebagai institusi inti demokrasi.

Dalam kasus Indonesia, apakah peran dan fungsi parpol yang ada sekarang sudah berjalan efektif atau belum. Apakah fungsi sosialisasi, fungsi rekrutmen, fungsi artikulasi, maupun fungsi agregasi dari parpol sudah dimainkan sedemikian sehingga eksistensi parpol sebagai ujung tombak demokrasi bisa dipertanggungjawabkan atau justru tujuan parpol hanya untuk meraih kekuasaan dan menenggelamkan peran dan fungsi dari parpol yang hakiki. Salah satu prasyarat terwujudnya demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik sehingga apa yang dikehendaki rakyat dapat disampaikan oleh wakil-wakilnya yang ada dilembaga pemerintahan.

Jatuhnya rezim Soeharto, dan munculnya era Reformasi membawa angin segar adanya perubahan di Indonesia. Perubahan inilah yang kemudian memberikan kesempatan pada para aktivis Da'wah Kampus untuk berkiprah sesuai dengan profesi dan bakatnya masing-masing. Bagi yang berprofesi dan bakat bidang ekonomi, memantapkan dirinya dalam bidang Perekonomian Syari'ah, bagi yang berprofesi pada bidang sosial, membentuk lembaga-lembaga sosial Islam, dan bagi yang berprofesi dan berbakat dalam politik, antara lain ada yang mendirikan partai politik

yang berorientasi utama pada da'wah, yang kemudian dikenal sebagai Partai Keadilan (pada pemilu 2004 menjadi Partai Keadilan Sejahtera), dengan tegas berazaskan Islam, Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Karena tumbuh dari gerakan da'wah dan berorientasi utama pada dakwah Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian dikenal sebagai Partai Dakwah.

Sosok partai ini merupakan sangat fenomenal sekali. PKS yang tegas-tegas menyatakan diri mereka sebagai partai yang bukan hanya mengusung bendera islam tetapi berasaskan islam. PKS juga mencoba menampilkan *issue-issue* nasional seperti: anti korupsi, partai pantang sogokan, bersih dan peduli. PKS mampu membuat partai mereka berbeda dengan yang lain, dan berbeda dengan PK yang terdahulu.

Dalam hal ini PKS mencoba menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan bangsa yaitu sebagai partai yang solutif. PKS bukan hanya partai yang meramaikan kancah perpolitikan yang diadakan lima tahun sekali, tetapi partisipasi mereka dilakukan sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang tidak berhenti selesai pemilu saja, tetapi terus melaksanakan program dan kebijakan mereka, contohnya partisipasi PKS dalam masalah-masalah sosial seperti aksi-aksi bantuan kemanusiaan.

Sebagai lembaga intermediasi, Partai Politik seharusnya menjadi pihak yang paling dekat dengan keluh kesah rakyat. Guna mewujudkan hal itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengerahkan kadernya untuk datang ke rumah-rumah warga. Mereka ditugaskan untuk bertanya dan mendengarkan apapun yang ingin di suarakan oleh rakyat Yogyakarta. Untuk lebih mengintensifkan fungsi artikulasi politik, pada

Minggu Pertama Maret 2008. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DIY melaunching program "PKS Mendengar".<sup>7</sup>

Pemilihan entry point ini mempertimbangkan perhatian publik yang besar dan momentum yang mengemuka belakangan ini. Dengan harapan PKS bisa mendengar langsung dari masyarakat tentang pernak-pernik tentang keistimewaan DIY secara utuh. Sebab selama ini masih ada semacam penyempitan tema tentang 'Keistimewaan DIY' yang seakan-akan hanya berkutat pada permasalahan Kepala Daerah. Belum ada eksplorasi yang partisipatif mengenai spektrum penerapan keistimewaan DIY pada aspek sosial, budaya, ekonomi rakyat, kebijakan publik, hukum, kesejahteraan umum dan pendidikan. Pendek kata isu keistimewaan DIY belum menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat Yogyakarta. Program 'PKS Mendengar' itu bukan sekadar aktifitas ceremonial belaka, PKS bertekad untuk menjadikan seluruh hasil pendengaran sebagai dasar pijakan pembuatan kebijakan program dan sikap partai.

Keengganan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) untuk memangku jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menjadi perbincangan hangat di tataran elite maupun warga masyarakat. Hal ini karena terkait dengan masa depan status keistimewaan DIY dalam tata pemerintahan di Indonesia.

Padahal tiga daerah di Indonesia yang diberi status istimewa telah tuntas diakomodasi dan diperkuat dengan legitimasi UU khusus, yakni DKI Jakarta melalui UU Nomor 34 Tahun 1999, Papua melalui UU Nomor 21 Tahun 2001, Aceh (NAD) melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 dan DIY melalui UU Nomor 3 Tahun 1950.

---

<sup>7</sup> *Ketahui Makna Keistimewaan Secara Utuh*, pks-jogja.org | Liputan Media | herin | <http://pks-jogja.org/detail.php?ID=591&cat=Berita,29-02-2008>

Disinilah titik krusialnya bermula, status keistimewaan DIY alih-alih tuntas diakomodasi oleh pemerintah pusat malah draf RUU Keistimewaan DIY hasil inisiatif pemerintah DIY, LSM, dan akademisi setempat untuk merevisi UU Nomor 3/1950 tak kunjung direson positif oleh pemerintah pusat.

Pernyataan sikap Sultan HB X ini menjadi polemik karena menurut ketentuan UU Nomor 3/1950, ciri keistimewaan DIY terletak pada susunan pemerintahannya, gubernur dijabat sekaligus oleh raja (Sultan HB) dan wakil gubernurnya oleh Adipati Paku Alam. Namun ketika Sultan menolak menjadi gubernur DIY lagi pasca tahun 2008, berarti secara politik DIY tak lagi istimewa.

Karena itu diperlukan pemikiran dan respon tepat dari pemerintah dalam memberikan status istimewa DIY. Kesalahan dalam menerjemahkan dan merespon keistimewaan DIY dapat berakibat fatal dalam menata sistem demokrasi yang akomodatif terhadap aspirasi daerah, termasuk dalam pemberian status istimewa bagi daerah tertentu yang dijamin oleh konstitusi (Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945).

Kefatalan ini dapat memicu kemarahan publik DIY dan mendorong lahirnya instabilitas DIY dan politik nasional menjelang Pemilu Raya 2009. Karena itu, tak ada cara lain dalam merespon pernyataan Sultan HB X ini kecuali pemerintah pusat segera bergegas memprioritaskan pengesahan RUU Keistimewaan DIY untuk merevisi UU Nomor 3/1950 yang tak lagi memadai menampung ide-ide besar keistimewaan DIY yang adaptif dengan tuntutan dan perubahan zaman. Ini terutama ditujukan guna memperjelas status keistimewaan DIY secara politik dan hukum.



Sesungguhnya keistimewaan DIY tidak hanya terletak pada aspek politik yang menempatkan gubernur sekaligus raja DIY. Sebagaimana diyakini oleh banyak kalangan, artinya kini semakin terbuka untuk memformat keistimewaan DIY dalam konteks kekinian. Pernyataan Sultan HB X ini sesungguhnya adalah bukti, bahwa keraton tak ingin dianggap sebagai institusi penghambat demokratisasi di DIY. Dengan ketidaksediaannya menjabat gubernur DIY pascatahun 2008 mendatang berarti akan membuka kran demokratisasi dan kesempatan lahirnya pemimpin politik lokal dari luar keraton. Karena itu banyak kalangan menilai pernyataan Sultan HB X adalah inspirasi demokrasi dan cermin kenegarawanan (statesman) Sultan HB X.

Pernyataan itu juga berarti isyarat dari keraton DIY bahwa perannya dalam konteks kekinian bukan di wilayah politik praktis yang cenderung kotor dan penuh interik akan tetapi kembali ke habitat aslinya, yakni pemangku adat, kebudayaan, dan spiritual. Artinya semangat pernyataan Sultan HB X itu adalah dalam rangka memecah dualisme kepemimpinan di DIY, yakni raja sekaligus gubernur. Dualisme ini mungkin di mata keraton mempersulit ruang gerak Sultan HB X sebagai pemimpin budaya, yang lambat laun tapi pasti akan hilang kharisma dan sakralitasnya di mata rakyat, tatkala pemerintahannya selaku gubernur DIY terinfeksi perilaku korup dan tak menyejahterakan rakyat.

Kedepan perlu dipikirkan secara matang dan sungguh-sungguh dalam mendesain status istimewa DIY ini dalam regulasi (UU) yang mapan, karena menyangkut nasib dan kesejahteraan rakyat DIY dan tata pemerintahan Indonesia. Kalau semangat dari pernyataan Sultan HB X itu dimaknai sebagai keinginannya, bahwa ciri keistimewaannya bukan terletak pada jabatan gubernur adalah sekaligus

raja. Pemerintah pusat harus lebih jeli dalam menentukan status Keistimewaan Yogyakarta dalam hal ini tentunya sangat berkaitan dengan menempatkan posisi Sultan HB X dan kerabatnya termasuk kerabat Adipati Paku Alam dalam tata pemerintahan demokratis di DIY pascatahun 2008 mendatang.

Itulah dua agenda yang menuntut untuk segera dijawab oleh pemerintah pusat dalam mengakhiri polemik tentang keistimewaan DIY di masa depan. Solusi yang dapat diajukan dalam menjawab agenda pertama adalah mendesain keistimewaan tidak dalam konteks politik, tetapi masuk ke wilayah-wilayah budaya, adat-istiadat, spiritualitas, pendidikan, ekonomi dan pertanian.

Sedangkan menjawab agenda kedua adalah menempatkan posisi Sultan HB X dan Adipati Paku Alam serta kerabatnya di atas gubernur yang diberi legitimasi kultural untuk merestui dan tidak merestui gubernur DIY. Karena itu gubernur DIY sebaiknya bukan berasal dari partai politik agar ia mampu mengakomodasi semua kepentingan publik DIY: kepentingan kraton, rakyat dan politisi. Sultan HB X diberi hak dan legitimasi tambahan untuk memveto kebijakan pemerintahan otonomi dan Peraturan Daerah (Perda) yang tak pro pada kesejahteraan rakyat dan kebajikan masa depan DIY.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu agar penelitian dapat berlangsung pada sasaran obyek yang telah ditentukan. Tujuan utama dari penelitian adalah memecahkan suatu masalah. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.<sup>8</sup>

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukan ketika tidak puas melihatnya saja melainkan kita ingin melihat lebih dalam.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Sikap Politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2007”**.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan sikap politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta terhadap Kestimewaan Yogyakarta Tahun 2007.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat dari penelitian ini secara teori untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dapat diterapkan dalam memahami sebuah masalah.

---

<sup>8</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal 34.

- b. Dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, karena di dalam penelitian pasti terdapat hal-hal baru yang ditemui atau sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, sehingga dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti maupun pihak-pihak yang terkait

#### **D. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan gambaran dari teori-teori yang berhubungan erat dengan masalah yang di teliti sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.<sup>9</sup> Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan-batasan tentang:

##### **1. Sikap Politik**

Sikap politik awalnya lahir lewat konseptualis dari studi-studi ilmu psikologi. Dengan alasan itulah teori sikap politik ini dimulai dengan pembahasan tentang sikap dalam disiplin ilmu psikologi. Makna sikap politik dalam teori ini di analogikan dari penggabungan antara teori politik dengan teori-teori sikap yang diambil dari berbagai tokoh yang ada.

Sikap mulai menjadi fokus pembahasan dalam ilmu sosial semenjak awal abad 20. Secara bahasa, Oxford Advanced Learner Dictionary (Hornby, 1974)

---

<sup>9</sup> Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ESD, Jakarta 1989, hal 37

mencantumkan bahwa sikap (*attitude*), berasal dari bahasa Italia *attitudine* yaitu yaitu “*Manner of placing or holding the body, dan Way of feeling, thinking or behaving*”. Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan perilaku. Free online dictionary mencantumkan sikap sebagai “*a complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways*”.<sup>10</sup>

Sikap adalah kondisi mental yang kompleks yang melibatkan keyakinan dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu.

Sikap (*attitude*) menurut Thrustone adalah sebagai unit dasar pengukuran. Sikap didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari kehendak hati dan perasaan-perasaan seserang, prasangka atau purbasangka, pendapat yang telah terbentuk sebelumnya, ide-ide, kekhawatiran, rasa terancam serta pendirian orang tersebut terhadap pokok pembicaraan tertentu.<sup>11</sup>

Sedangkan definisi dari politik adalah ilmu negara atau tatanegara; sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk mempengaruhi kebijakan.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sikap Politik adalah pernyataan evaluatif terhadap objek atau suatu pokok permasalahan untuk mempengaruhi kebijakan politik disuatu negara atau pemerintahan.

---

<sup>10</sup> (www.thefreedictionary.com)

<sup>11</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 20.

<sup>12</sup> Achmad Mualana, *Kamus Ilmiah Populer, Absolut*, Yogyakarta, 2004, hal 408.

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu:

- 1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganannya (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.
- 2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.
- 3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.<sup>13</sup>

Franciscus Xaverius Seda mengenalkan dua tipe politisi dalam menentukan sikap politiknya<sup>14</sup>, yakni para politisi yang dalam mengambil sikap terhadap suatu masalah politik mendahulukan popularitas politik, dan mereka yang mengutamakan kepribadian politiknya. Ini tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki kepribadian politik tidak juga memperhatikan masalah

---

<sup>13</sup> Stephen P. Robbins dan Timoty A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 92-93.

<sup>14</sup> Franciscus Xaverius Seda, *Popularitas vs Kepribadian Politik*, www.yahoo.com

popularitas, dan sebaliknya bahwa seseorang yang mengejar popularitas tidak memiliki kepribadian politik. Namun masalahnya adalah masalah mendahulukan, masalah prioritas dan preferensi dalam mengambil sikap politik.

Dalam hal kepribadian politik, seperti dalam setiap masalah kepribadian, maka watak, karakter dan pembawaan (bukan terutama kemampuan) seseorang politikuslah yang menentukan sikap politiknya

Sikap politik terdiri dari berbagai tingkatan yakni :<sup>15</sup>

1) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang atau kelompok (subyek) mau menerima kebijakan dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

2) Merespon (*responding*)

Memberikan tanggapan apabila ada setiap kebijakan yang muncul, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk memberikan tanggapan atau mengerjakan tugas yang diberikan.

3) Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga

4) Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

---

<sup>15</sup> Franciscus Xaverius Seda, *ibid*

Robert Lane dan David Sears berpendapat, bahwa sikap politik atau pendapat umum dapat memberikan pengarahan. Ini berarti bahwa beberapa individu akan menyetujui pandangan tertentu, sedangkan individu yang lain menentangnya.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan sikap politik adalah pandangan berbagai kalangan warga masyarakat atau kelompok mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama mereka dalam suatu masyarakat. Tercakup disini adalah persetujuan dan tidak setuju atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Proses pembentukan pendapat berkaitan erat dengan proses sosialisasi politik, partisipasi, dan rekrutmen politik. Dalam hal ini pengetahuan, nilai-nilai, sikap merupakan faktor penting, karena faktor-faktor itulah yang menentukan perilaku politik. Selain menentukan perbedaan perilaku politik, perbedaan pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan sikap-sikap mereka menentukan perbedaan pandangan tentang berbagai issue politik.

Lane dan Sears juga berpendapat, pengarahan merupakan salah satu ciri dari pendapat atau sikap politik. Ciri-ciri lain dari pendapat adalah intensitas dan pentingnya masalah. Ciri intensitas tampak dari frekuensi pelemparan suatu pendapat. Sedangkan yang berkaitan dengan intensitas adalah tingkat kepentingan masalah. Suatu masalah yang penting dengan mudah mengundang pendapat dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat.

---

<sup>16</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 169.



Sikap politik bisa tidak konsisten berdasarkan dua alasan. *Pertama*, karena seseorang atau kelompok mungkin saja menganut suatu pendapat hanya sampai pada tingkatan tertentu. *Kedua*, karena pendapat tertentu itu tidak sesuai pengetahuan yang dimiliki. Dan pendapat bisa lebih konsisten apabila hubungan tingkat rasionalitas seseorang atau suatu masyarakat yang tinggi, karena individu yang rasional lebih terbuka terhadap berbagai macam informasi. Untuk menjadikan individu-individu atau kelompok masyarakat lebih rasional, individu atau kelompok masyarakat harus membuka diri baik terhadap hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.

Pendapat umum atau sikap politik juga dapat berubah dan itu disebabkan oleh dua faktor berikut<sup>17</sup>. *Pertama*, karena banyaknya perlawanan atas pendapat dari berbagai kalangan yang menghendaki perubahan segala yang ada. *Kedua*, karena ketidakpercayaan atas pihak-pihak yang sebelumnya dijadikan sumber informasi yang diandalkan.

Dalam proses ini, komunikasi dan sosialisasi politik menjadi katalisator, sarana dinamis, yang memungkinkan informasi-informasi politik yang relevan bisa mencapai segenap lapisan masyarakat dan akan membentuk orientasi politik pada diri masyarakat yang bersangkutan. Orientasi politik ini memang bersifat sementara, akan tetapi pada saat tertentu akan mendorong orang untuk menduduki jabatan politik tertentu.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 172

Sosialisasi politik itu menyangkut suatu jaringan yang rumit dari pengetahuan, nilai-nilai, sikap yang dialihkan dari individu atau kelompok yang satu kepada individu-individu atau kelompok yang lain dalam sistem politik. Yang tercakup dalam sosialisasi politik disini adalah pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku para insan politik, semua ini pada akhirnya akan membentuk apa yang disebut layar persepsi. Dengan layar persepsi itu dapat berubah sesuai dengan perubahan pengetahuan, nilai-nilai, sikap individu atau kelompok yang bersangkutan. Disamping itu perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua rangsangan politik dengan sendirinya diterima. Penerimaan dan penolakan atas rangsangan politik itu menentukan perbedaan perilaku politik khususnya menentukan sikap politik antara individu atau kelompok masyarakat satu dengan yang lain.

## **2. Partai Politik**

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem keterwakilan (*representativeness*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kewarganegaraan seperti parlemen (DPR/ DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

Secara umum dapat diketahui bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

*Carl J. Friedrich*: Partai Politik adalah "sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan meteril."<sup>18</sup>

*R.H. Sultou*: Partai Politik adalah "sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka."<sup>19</sup>

Sebelum membahas lebih lanjut peran dan fungsi-fungsi Parpol perlu diawali pembahasan paling mendasar tentang mengapa harus ada Parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut *Lapalomba* dan *Myron* dalam bukunya Koirudin menjelaskan, Parpol lahir dan berkembang ketika gejala modernisasi sedang berkembang di Eropa setelah revolusi industri. Karena itu awal perkembangan Parpol bisa diuraikan sebagai berikut: Pertama, merupakan salah satu indikator gejala modernisasi masyarakat, dimana telah terjadi ledakan partisipasi masyarakat dan pemindahan hak-hak politik kepada masyarakat yang semakin meluas (*Lapalomba dan Myron*). Kedua, Teori Situasi Histori (*historical situation theory*), dimana kemudian partai politik berkaitan dengan krisis yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

---

<sup>18</sup> Friedrich dalam Prof. Meriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1993, hal 161

<sup>19</sup> R.H. Sultou, *ibid* hal 161

Ada tiga krisis yang mendorong munculnya Parpol.<sup>20</sup> Pertama adalah krisis legitimasi seiring dengan modernisasi, dimana didalam masyarakat terjadi perubahan yang besar, adanya tuntutan perubahan otoritas yang dimiliki oleh kerajaan yang feodal dimana masyarakat kalangan menengah, borjuis, tidak lagi memendang penguasa memiliki legitimasi. Parpol didirikan sebagai upaya untuk mencari pemimpin yang memiliki otoritas yang *legitimate*. Dengan demikian parpol merupakan instrumen kelas menengah untuk memperoleh dukungan dari bawah (*Lapalomba dan Myron*). Kedua adalah Krisis Integrasi, hal ini dimulai ketika modernisasi mengancam disintegrasi wilayah. Kemunculan parpol dimaksud untuk mengatasi krisis *integrasi*, terutama apabila parpol memiliki basis dukungan yang lintas wilayah. Ketiga adalah adanya krisis partisipasi telah membawa perubahan yang besar dibidang sosial, ekonomi, dan politik (*Duverger, 1967*).

Berkaitan dengan pembahasan arti keberadaan Parpol dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan demikian jatuh banggunya perkembangan yang dialami bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran dan fungsi partai politik.

#### **a. Peran Partai Politik**

Peran partai politik dalam proses interaksi antara negara dan rakyat dalam wujud kebijakan publik. Bila Parpol tidak beranjak dari fungsi konvensional<sup>21</sup> yang sebatas hanya perebutan kekuasaan saja, maka dalam konteks dinamika sosial yang ada hal tersebut tidak lagi

---

<sup>20</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 64-65

<sup>21</sup> Konvensional adalah berdasarkan kondisi yang ada atau tata cara, secara pearsetujuan.

menemukan arti penting (*signifikasi*) yang tinggi. Masyarakat modern adalah masyarakat yang memandang partai politik tidak lagi sebatas pada ikatan ideologis semata, namun masyarakat modern lebih melihat partai politik sebagai proses aktualisasi diri dalam bentuk kebijakan publik (Howlett dan Rames, 1998).<sup>22</sup>

Dalam hal ini apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengidentifikasi kualitas kiprah dari lembaga-lembaga sosial politik yang hidup di masyarakat. Dengan semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan parpol sudah dianggap sebagai perwujudan atau lambang dari negara modern. Oleh karena itu, hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang, memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi parpol di berbagai negara berbeda satu sama lain sesuai dengan sistem politik yang diterapkan negara itu.

Dari pemaparan singkat diatas dapat terlihat jelas bahwa pekerjaan Parpol bukan hanya dalam hal perebutan kekuasaan saja. Dan lebih dari itu fungsi perebutan kekuasaan juga merupakan sebagian kecil dari pekerjaan parpol dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini ditunjukkan dengan operasionalisasi fungsi kekuasaan yang hanya berlangsung dalam siklus lima tahun. Sedangkan fungsi yang

---

<sup>22</sup>Koirudin, Ibid , hal 67

paling pokok justru terletak pada manuver taktis parpol dalam perwujudan kebijakan publik. Sebab kebijakan publik adalah wujud nyata dari interaksi antara negara dan masyarakat.

### **b. Fungsi Partai Politik**

Ada banyak pakar yang menguraikan tentang fungsi-fungsi parpol: <sup>23</sup> *Monte Palmer*, mengatakan bahwa fungsi-fungsi paspol di negara berkembang adalah menyediakan dukungan basis masa yang stabil, sarana *integrasi* dan *mobilisasi*, dan memelihara kelangsungan hidup politik.

*Roy C. Macridis*, fungsi Parpol adalah sebagai perwakilan (*representasi*); melakukan artikulasi kepentingan; dan ekspresi dari parpol untuk kepentingan yang diwakilinya, melakukan transformasi proses dari *input* menjadi *output*, *integrasi*, *persuasi*, *represi*, *rekrutmen* dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijakn publik, dan kontrol terhadap pemerintah.

Adapun fungsi partai politik yang ideal menurut *Gabriel A. Almond* dan *Coleman* adalah<sup>24</sup>:

*Pertama*, berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga

---

<sup>23</sup> Koirudin , Op. cit hal 86-104

<sup>24</sup> Almond, Gabriel A. and James S. Coleman, dalam makalah *Mencari Partai Politik Idaman*, <http://one.indoskripsi.com/artikel-skripsi-tentang/mencari-partai-politik-idaman>

dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun *output* pada umumnya. *Kedua*, berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan). *Ketiga*, berperan untuk dapat memadu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Sedangkan Drs. Sukarna menggabungkan fungsi partai politik dari berbagai pendapat ahli politik di antaranya Miriam Budiarjo, Maurice Duverger, Huszar dan Stevenson, menyatakan bahwa partai politik berfungsi :<sup>25</sup>

1. Edukasi politik,
2. Sosialisasi politik,
3. Seleksi politik,
4. Artikulasi kepentingan,
5. Mengelola konflik,
6. Komunikasi politik,
7. Kontrol politik atau krititik terhadap rezim,
8. Merangsang opini publik,

---

<sup>25</sup> (Sukarna, 1981, *Demokrasi versus Kediktatoran*, Bandung: Alumni.) dalam dalam makalah *Mencari Partai Politik Idaman*, <http://one.indoskripsi.com/artikel-skripsi-tentang/mencari-partai-politik-idaman>.

9. Mencalonkan kandidat,
10. Memilih pejabat publik,
11. Agregasi politik.

Mari kita bahas paling tidak lima fungsi pertama yaitu yang disebutkan oleh kebanyakan ahli sebagai fungsi partai politik. Dari pembahasan ini semoga kita dapat menemukan pegangan atas pencarian partai politik idaman yang kita lakukan.

*Edukasi Politik.* Untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sejatinya pendidikan politik dapat diterima di manapun. Baik itu di lembaga pendidikan formal maupun tempat yang bukan lembaga pendidikan. Dan partai politik adalah salah satu yang harus paling bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rakyat akan pendidikan politik. Partai politik tak sedikit yang melakukan pendidikan politik dalam bentuk pelatihan kader atau kursus-kursus. Namun pendidikan itu terbatas pada rakyat yang sudah terdaftar sebagai kader. Jarang sekali ditemukan partai politik yang melakukan pendidikan politik yang terbuka untuk umum. Lantas bagaimana dengan rakyat yang belum yakin untuk bergabung dengan partai politik? Akhirnya partai politik menjadi organisasi yang eksklusif namun tidak selektif.



*Sosialisasi Politik.* Untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat dengan pemerintah. Menurut Rusadi, sosialisasi politik dapat disamakan dengan komunikasi politik yang tak lain adalah proses interaksi, stimuli-kontra-stimuli, penyampaian fakta, kepercayaan, kelakuan, reaksi emosional dalam bidang atau tentang objek politik. Sedangkan di lapangan rasanya sulit sekali untuk dapat bertemu dengan wakil kita di dewan perwakilan. Feodalisme menjadi budaya yang akhirnya dilestarikan demi kenyamanan para elit. Selain itu juga, partai politik di level akar rumput nampak tak terbiasa menyampaikan pesan politik dari pemerintah kepada rakyat dan juga menerima aspirasi rakyat untuk pemerintah. Fungsi partai politik sebagai fasilitator antara rakyat dan penguasa tidak berjalan dengan baik karena selain memang tidak dibina, kegiatan kantor (atau sekretariat atau rumah) partai politik di level akar rumput hanya terlihat eksis bila mendekati hajatan demokrasi saja (Pemilu dan Pilkada). Akhirnya partai politik menjadi handphone tak berpulsa dan tak berbaterai.

*Seleksi Politik.* Untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang dihasilkan dari rangkaian pendidikan politik yang sistematis dan selektif atas dasar kompetisi yang ketat. Partai politik berfungsi untuk mencetak kader-kader unggulan dan lantas menyeleksinya. *Herman Finer* mendeskripsikan sifat ideal pemimpin (baik itu yang terlahir alamiah maupun yang dibina secara buatan) adalah memiliki kesadaran, kebulatan pandangan, ketetapan jiwa, keyakinan, kreatif, manusiawi, berani,

kemampuan yang memukau, dan kepandaian. Namun pada kenyataannya partai politik sebagai *political vehicle* ternyata lebih senang direntalkan kepada orang yang mempunyai kemampuan membayar dana sewa. Tak peduli orang seperti apa yang mau menyewa yang penting dia punya kapabilitas finansial untuk membayar ongkos sewa maka dia akan diantarkan menuju kursi yang diharapkan.

*Artikulasi Politik.* Untuk menampung kepentingan konstituen kemudian memformulasinya menjadi sebuah kepentingan kolektif. Artikulasi ini melalui proses sintesis aspirasi banyak orang. Namun karena sudah saya paparkan di atas bahwa partai politik menjadi organisasi yang eksklusif maka sulit bagi publik menyertakan pandangannya dalam penampungan tersebut. Karena fungsi sosialisasi yang tidak berjalan baik maka hanya elit partai atau yang memiliki akses langsung akibat hubungan emosional ke elit saja yang dapat memasukkan aspirasinya untuk ditampung dalam rangka artikulasi kepentingan tersebut. Akar rumput jelas tak memiliki kemampuan untuk menjangkau ini karena perangkat partai politik di tingkat ini tidak berjalan dengan optimal, maka partai hanya menjadi milik elit belaka.

*Manajemen Konflik.* Ketidaksamaan pandangan yang berujung ada kepentingan yang beragam merupakan salah satu dari banyak penyebab konflik. Untuk itu, partai politik berfungsi untuk dapat mengelola konflik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk hal ini, jangan dulu berbicara pada tataran eksternal partai, konflik internal partai pun seringkali tak dapat diselesaikan oleh partai politik tersebut yang berakibat separasi partai politik. Muncullah partai-partai baru sebagai pecahan dari partai lama. Logika sederhanya adalah bagaimana mungkin sebuah partai dapat mengelola konflik di tingkat masyarakat dan Negara bila konflik internal saja tidak dapat dikelola dengan baik?

Dari berbagai paparan teoritis yang disandingkan dengan empiris tersebut nampaknya memang tak dapat disalahkan apabila rakyat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik karena memang partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya secara *holistik* dan komprehensif. Idiom bahwa partai politik adalah kendaraan menuju kekuasaan telah mendistorsi fungsi partai politik itu sendiri.

Ramlan Subarki, menguraikan fungsi Parpol adalah sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kebutuhan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompok dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

## 2. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif dalam pembuatan kebijakan publik.

## 3. Fungsi Sosialisai Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk mentransformasi nilai-nilai politik, sikap-sikap, etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.

## 4. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam lembaga administrasi maupun politik.

## 5. Fungsi Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi informasi, *issue*, gagasan politik.

### c. Klasifikasi Partai

Klasifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari fungsi dan komposisi keanggotaannya secara umum partai dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu partai masa dan partai kader, dan dapat juga dilakukan dari segi sifat dan orientasi, partai dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Partai Lindungan (*patronage party*) dan Partai Ideologi atau Partai Azas.<sup>26</sup> Partai masa mengutamakan keketatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya dari pendukung-pendukung berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya, dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan partai masa ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung dibawah partai masa cenderung untuk memeksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat krisis, sehingga persatuan partai biasanya cenderung melamah atau malah hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

Partai kader biasanya lebih mementingkan keketatan organisasi dan kedisiplinan kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian *doktrin* politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggota dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang ditetapkan.

---

<sup>26</sup> Prof. Meriam Budiarjo, op. cit, hal 166- 167

Partai Lindungan (*patronage party*) pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sangat ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur.

Sedangkan Partai ideologi atau partai azas (Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen-Demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

### **3. Spesifikasi Teori-Teori Keistimewaan Yogyakarta**

#### **a. Keistimewaan menurut RUU Keistimewaan.**

Menurut Tim Penyusun dan Pengarah Rancangan Undang-Undang Keistimewaan yang terdiri dari: Prof. Affan Gaffar, Prof. Ryass Rasyid, Dr. Andi Malaranggeng, Drs. Riswanda Imawan Ph.D menyatakan Keistimewaan Yogyakarta terletak pada eksistensi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

*Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.*<sup>27</sup>

Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darussalam (NAD), memang tidak mempunyai kedudukan yang khusus seperti DKI Jakarta dan Otonomi Khusus seperti di Provinsi Papua akan tetapi kedua daerah ini memiliki kondisi spesifik yang cukup

---

<sup>27</sup> Rancangan Undang -Undang Republik Indonesia, Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).

menonjol perbedaannya dengan daerah lain. Oleh karena itu kedua daerah itu diberi sebutan dan kedudukan daerah istimewa, bagi Yogyakarta secara legitimasi yuridis kedudukannya sebagai daerah istimewa, selain itu tercantum pada piagam penetapan dan amanat kedua raja Kasultanan dan Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal 15 September dan 30 Oktober 1945, dan lebih diperkuat dalam UU No.3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga UU No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.

Selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijabat oleh raja, Yogyakarta juga memiliki Keistimewaan dibidang:<sup>28</sup>

1. Pertanahan.

Keistimewaan dibidang pertanahan yang disebut tanah nagari itu memiliki dan menguasai 'pasitan nagari' dengan batas dan luas tertentu, yang kemudian berkedudukan menjadi tanah adat, dan dikonversi menjadi tanah hak milik Kraton Ngayogyakarta.

2. Kependudukan.

Sebagai daerah kerajaan, sebelum kemerdekaan Indonesia dan pernyataan integritas monarkinya kedalam NKRI, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mempunyai 'Kaula Nagari' yaitu masyarakat atau rakyat yang mempunyai jiwa dan bersatu serta menanti 'Parentah luhur karaton' sebagai perintah yang sah.

---

<sup>28</sup> Dikutip dari: BA Acara No. 10 Th 2003, *Mengenai Rancangan UU RI tentang Keistimewaan DIY*, Sekretaris DPRD Provinsi DIY 2003.

3. Negara Kerajaan.

Dari segi hukum Negara Kraton Yogyakarta telah mendapatkan pengakuan secara *de jure*, hal ini terlihat dari diselenggarakannya hubungan kerja sama bilateral antara Kerajaan Ngayogyakarta dengan Negara Belanda selayaknya NEGARA yang berdaulat, dan berakhir pada tahun 1940.

4. Daerah otonomi berdasarkan azas desentralisasi.

Dalam semangat otonomi daerah yang penyelenggaraannya pemerintahan di daerah bersifat desentralisasi, Yogyakarta merupakan bentuk daerah otonomi yang berdifat istimewa setingkat provinsi, berhak dan berwenag untuk mengatur rumah tangganya sendiri pada sejumlah bidang atau urusan yang diatur dalam UU No.3 tahun 1950.

5. Penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal rekrutmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, Yogyakarta tetap menjalankan pemerintahan di daerah sesuai dengan UU Otda No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kecuali pasal 58 tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**b. Keistimewaan Berdasarkan Penjaringan Aspirasi DPRD.**

Tanggapan terhadap RUU Keistimewaan DIY diperoleh dari beberapa seminar baik yang diselenggarakan secara formal maupun non formal yang diselenggarakan di Hotel Santika 13 Juli 2002, Hotel Garuda



24 Juli 2004 dan Hotel Phonik 26 Juli 2002, dan hasil penjarangan tersebut menghasilkan yang berbeda-beda menurut:

1. Dr. Jawahir (UII).

Keistimewaan terletak pada aspek historisnya

2. Achmad Muhsin (IAIN/ UIN).

Substansi Keistimewaan Yogyakarta terdiri 4 (empat) aspek yaitu, Pertanahan, dan ketiganya ditinjau dari aspek sejarah mengapa DIY perlu bersifat "istimewa":

- a) Pada awal kemerdekaan NKRI, Yogyakarta sebagai pelopor integrasi.
- b) Ketika Negara Indonesia dalam keadaan bahaya, Yogyakarta memiliki peran utama.
- c) Dimasa reformasi, Yogyakarta mempunyai peran strtegis dan terbukti DIY tidak rusuh.

3. Emha Ainun Najib

Keistimewaan Yogyakarta terletak pada budaya Yogyakarta yang pluralistik, yang melebihi daerah lain.

**c. Keistimewaan: Ungkapan Dalam Media Massa.**

1. San Afri Sawang.

Keistimewaan Yogyakarta terletak pada upaya semua pihak untuk tidak melibatkan pimpinan kultural dalam pemerinyahan, karena pimpinan kultural diposisikan sebagai milik semua orang. Yogyakarta hanya dari aspek kepemimpinan saja, adalah hal yang

sangat keliru. Karena Keistimewaan Yogyakarta perlu terletak pada beberapa pijakan:

- a) DPRD harus memposisikan kedua pimpinan kultural itu diatas pimpinan politik, tetapi mencerminkan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi seperti dicontohkan oleh Sultan HB IX.
- b) Tunjukan pada dunia, bahwa multi etnik, multi agama dan ,ulti kebudayaan hanya di Yogyakarta.
- c) Keistimewaan patut disandang Yogyakarta, jika semua komponen didaerah ini mampu menghilangkan kemiskinan masyarakatnya dalam arti luas, taraf hidup meningkat, tidak ada pengemis, tidak ada petani yang memiliki lahan dan sebagainya.
- d) Dengan tetap dalam rangka NKRI, Yogyakarta memiliki hak ekonomi, hukum, dan politik yang berbeda dengan daerah yang lain.

## 2. Lambang Trijono.

Dalam artikelnya yang berjudul "Keistimewaan Yogyakarta, Keistimewaan Rakyat" menyatakan bahwa:

*"Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya terletak pada Sultan dan Kraton sebagai simbol politik budaya, tetapi juga terletak pada Keistimewaan rakyatnya. Tanpa ditopang rakyat yang toleran, sopan, ramah, bersahaja, alturistik, mau berkorban demi kepentingan orang lain dan patuh pada penguasa seperti yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Yogyakarta, mustahil ada keistimewaan di DIY".*

Untuk lebih memeperjelas substansi keistimewaan yang dimiliki oleh DIY, maka disini penulis menyajikan perbandingan daerah-daerah yang juga memiliki sifat "istimewa" dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **d. Keistimewaan Yogyakarta menurut Partai Keadilan Sejahtera**

Keistimewaan Yogyakarta terletak pada latar belakang terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kasultanan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga Undang-Undang terkait Keistimewaan nantinya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai islam.<sup>29</sup>

#### **4. Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Menurut logeman negara adalah organisasi, yang ada pada hakikatnya sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang dalam hal ini tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat adil makmur dan sejahtera berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. oleh karena itu Negara Indonesia menghormati satu-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam UUD 1945, BAB Penjelasan pasal 18 daerah yang bersifat istimewa adalah daerah-daerah yang memiliki susunan asli baik berbentuk kerajaan atau swapraja dan seperti desa-desa yang ada di Jawa dan Bali atau Dusun dan Marga di Palembang serta Nagari di Minangkabau dan masih banyak lagi.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ahmad Sumiyanto, S.E., M.Si selaku Ketua Umum DPW PKS DIY.

### **E. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah:

- a. Sikap Politik adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek sosial sehingga terbentuk suatu pernyataan evaluatif terhadap objek atau suatu pokok permasalahan untuk mempengaruhi kebijakan politik disuatu negara atau pemerintahan
- b. Partai Politik adalah salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sitem keterwakilan (*representativenees*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kewarganegaraan seperti parlemen (DPR/ DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.
- c. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Keistimewaan Yogyakarta terletak pada latar belakang terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kasultanan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga Undang-Undang terkait Keistimewaan nantinya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai islam

## F. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut Koentjaraningrat adalah :

“.....usaha mengubah konsep yang berupa konstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.”<sup>30</sup>

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis Sikap Politik Dpw Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2007, dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persepsi PKS terhadap Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Keistimewaan Yogyakarta dalam Bidang Politik dan Pemerintahan.
  - b. Keistimewaan dalam bidang Pertanahan.
  - c. Keistimewaan dalam bidang Sosial Budaya.
2. Peran dan fungsi PKS sebagai partai politik terkait Keistimewaan DIY
  - a. Fungsi Artikulasi Kepentingan.
  - b. Fungsi Agregasi Kepentingan.
  - c. Fungsi Sosialisasi Politik.
  - d. Fungsi Manajemen Konflik.
  - e. Fungsi Partai Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemerintahan.

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974, hal 75

3. Sikap Politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta.
  - a. Bagaimana PKS menerima isue yang berkembang di masyarakat terkait Keistimewaan Yogyakarta
  - b. Bagaimana PKS merespon isue terkait Keistimewaan Yogyakarta
  - c. Bagaimana PKS menghargai pendapat yang berkembang di masyarakat terkait Keistimewaan Yogyakarta
  - d. Bagaimana PKS bertanggung jawab atas sikap politiknya terkait Keistimewaan Yogyakarta

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>31</sup>

Winarno Surachman berpendapat metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja yaitu dengan kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah untuk menggambarkan atau mencari hubungan yang terdapat pada suatu permasalahan yang bertujuan mengumpulkan data.

---

<sup>31</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hal 34.

Menurut Hadari Nawawi: "Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek obyek (seorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau sebagaimana adanya."<sup>32</sup>

Selanjutnya metode penelitian deskriptif ini sering disertai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

Sedangkan yang dimaksud deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data telah masuk, untuk kemudian diadakan pengelolaan dari data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan pengklasifikasian terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan

## **2. Unit Analisis**

Yang akan dijadikan sebagai nara sumber oleh peneliti dalam pencarian data yaitu:

- a. Ketua umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>32</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1983, hal 67

- b. Ketua VII/Bidang Polhukam Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Wakil Sekretaris III/Pusat Informasi-PKS Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi kasus pada Sikap DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap Keistimewaan Yogyakarta.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu karena penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana partai-partai politik di Indonesia khususnya Yogyakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga politik terkait isu Keistimewaan Yogyakarta.

### **4. Jenis Data**

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diperoleh.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung di ambil dari subyek penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Saifudin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 91



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. *Interview* / wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba, antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Yang membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah:<sup>35</sup>

1. Pewawancara dengan responden biasanya belum saling kenal mengenal sebelumnya.
2. Responden selalu menjawab pertanyaan.
3. Pewawancara selalu bertanya.
4. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus bersifat netral.
5. Pertanyaan yang ditanyakan harus mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.

---

<sup>34</sup> Dr. Lexy J. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 135

<sup>35</sup> Moh Nazir, Op.cit, hal 234

Interview atau wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan Fungsiaris Partai Keadilan Sejahtera serta kader-kader partai.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

## **6. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan metode penelitian, dalam hal ini maka proses analisa data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Dalam teknik ini peneliti mencoba melakukan dengan membuat pengklasifikasian data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang digunakan seperti terdiri dari catatan lapangan, catatan peneliti, dokumentasi berupa laporan, studi pustaka, artikel, wawancara dan sebagainya. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu menyajikan data kemudian menarik kesimpulan, selain itu pula dilakukan siklus antar tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.

Adapun proses yang dilakukan dalam analisa data ini adalah:

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses manipulasi, integrasi, transformasi data dan menyoroti data ketika data itu disajikan. Tahap ini dilakukan dengan cara antara lain peningkatan, pengkodean, dan pengkategorisasian data.

Reduksi data membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dari pertanyaan penelitian untuk memfokuskan pengumpulan data, pengambilan sampel, metode-metode sehingga akhirnya pada suatu kesimpulan.

## 2. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

## 3. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian pola-pola dan kejegan, juga menemukan kecendrungan-kecendrungan. Memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu yang memungkinkan pengembangan beberapa sudut pandang yang lebih tegas untuk memberikan gambaran peneliti selanjutnya.